

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMASANGAN PILAR BATAS WILAYAH OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN ROKAN HILIR DI DAERAH KECAMATAN
SINABOI DAN WILAYAH PERBATASAN DUMAI
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141
TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN
BATAS DAERAH**



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

MUKHAMMAD RUDIANTO

NIM. 11627104095

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2021**



PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul ***“Pelaksanaan Pemasangan Pilar Batas Wilayah Oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Di Daerah Kecamatan Sinaboi Dan Wilayah Perbatasan Dumai Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Batas Daerah (Studi Di Rokan Hilir Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau)”*** yang ditulis oleh:

Nama : MUKHAMAD RUDianto

NIM : 11627104095

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Rajab 1442 H
19 Juli 2021 M

Pembimbing Skripsi


SYAFRINALDI, S.H., M.A.

NIK. 190109252006041004

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "PEMASANGAN PILAR BATAS WILAYAH OLEH PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR DI DAERAH KECAMATAN SINABOI DAN WILAYAH PERBATASAN DUMAI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN BATAS WILAYAH" yang ditulis oleh :

Nama : **MUKHAMAD RUDianto**
 NIM : 11627104095
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 04 November 2021
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 November 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Asril, S.H.I., M.H.

Sekretaris
Joni Alizon, S.H., M.H.

Penguji I
Syafrinaldi, SH., MA.

Penguji II
Peri Pirmansyah, S.H., M.H.



Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005



Lampiran Surat : Pernyataan
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :
 Nama : MUKHAMAD RUDIANTO
 NIM : 11627109095
 Tempat/Tgl. Lahir : SUKTEMEHENGUNG 23 Juni 1997
 Fakultas/Pascasarjana : HUKUM PERPATA SI
 Prodi : ILMU HUKUM

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Pelaksanaan Penanaman Pilar batas wilayah oleh pemerin
tan kabupaten Rokan hilir di daerah kecamatan Sinaboi dan
wilayah perbatasan Dumai berdasarkan Peraturan menteri
dalam negeri republik Indonesia Nomor 141 tahun 2014
tentang pengesahan batas wilayah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Kamis 21-10-2021

Yang membuat pernyataan

Materai
 Rp.10.000



NIM : 11627109095

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



ABSTRAK

Penegasan Batas Daerah adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas daerah. Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir adalah tidak adanya pilar batas wilayah antara Kecamatan Sinaboi dengan Kota Dumai, sehingga masyarakat Sinaboi yang sedang membuka lahan tidak tau batas tanah antara Kecamatan Sinaboi dengan Kota Dumai. Hal ini menimbulkan konflik perebutan wilayah antara masyarakat Kecamatan Sinaboi dengan Kota Dumai. Pemasangan pilar batas wilayah oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di Daerah Kecamatan Sinaboi dan wilayah perbatasan Dumai berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah belum terlaksana karena sampai saat ini belum ada tapal batas daerah yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang berada di Kecamatan Sinaboi.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemasangan pilar batas wilayah oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di Daerah Kecamatan Sinaboi dan wilayah perbatasan Dumai berdasarkan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, serta untuk mengetahui faktor penghambat pemasangan pilar batas wilayah oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di Daerah Kecamatan Sinaboi dan wilayah perbatasan Dumai.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yakni melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif.

Pemasangan pilar batas wilayah oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di Daerah Kecamatan Sinaboi dan wilayah perbatasan Dumai berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah belum terlaksana. Adapun faktor penghambatnya diantaranya adalah; (i) kurangnya kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam menyelesaikan permasalahan tapal batas yang ada di Kecamatan Sinaboi; (ii) kurangnya kesadaran hukum; (iii) belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmad dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pemasangan Pilar Batas Wilayah Oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Di Daerah Kecamatan Sinaboi Dan Wilayah Perbatasan Dumai Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA RIAU.
2. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda Lasmari dan ibunda Siti Zubaidah yang telah mencurahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas. Dan tak henti-hentinya mendoakan penulis dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta seluruh keluarga yang selalu bersabar dan memberikan semangat serta dukungan moril maupun materil serta do'a.
3. Terimakasih juga kepada saudara penulis yaitu, Lumkan Susanto, Darmanto, Lusi Julia Fitro yang telah memberikan nasehat, bimbingan serta doa dan support yang selalu diberikan kepada penulis hingga mencapai pada keberhasilan penulis.
4. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta WD I, WD II, WD III dan Bapak Firdaus, SH. MH, selaku Ketua Jurusan

- Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Syafrinaldi, S.H., M.A selaku pembimbing skripsi penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
 6. Bapak Syafrinaldi, S.H., M.A selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
 7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada Penulis
 8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada Penulis.
 9. Kepala Perpustakaan beserta pegawainya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk mendapatkan bahan dalam penyelesaian penelitian ini.

Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan sebagai akibat keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua. Amin, Ya Rabbal Alamin.

Wasalamu'alaikun Wr.Wb.

Pekanbaru, November 2021

Penulis,

MUKHAMAD RUDIANTO
NIM : 11627104095



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kecamatan Sinaboi	20
B. Perkembangan Penduduk	21
C. Penduduk Menurut Mata Pencarian	23
D. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	23
E. Sarana Dan Prasarana Umum Kecamatan Sinaboi	25
F. Struktur Organisasi Kecamatan Sinaboi	26
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Negara Kesatuan Republik Indonesia	27
B. Pemerintah Daerah	29
1. Pengertian Pemerintahan Daerah	29
2. Asas-Asas Pemerintahan Daerah.....	30
C. Pilar Batas Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah	33
D. Teori Negara Hukum.....	39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemasangan Pilar Batas Wilayah Oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Di Daerah Kecamatan Sinaboi Dan Wilayah Perbatasan Dumai Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegsasan Batas Daerah.....	46
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemasangan Pilar Batas Wilayah Oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Di Daerah Kecamatan Sinaboi Dan Wilayah Perbatasan Kota Dumai	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Table I.1	Populasi Dan Sampel.....	14
Tabel II.1	Jumlah Penduduk Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020.....	22
Tabel II.2	Penduduk Menurut Mata Pencarian Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020	23
Tabel II.3	Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020	23
Tabel II.4	Sarana Dan Prasarana Umum Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 202	25
Tabel II.5	Struktur Organisasi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020	26



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Prinsip negara hukum pada dasarnya mengisyaratkan adanya aturan main dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sebagai aparatur negara. Pilihan pendiri negara atas bentuk ini membawa konsekuensi bahwa negara Indonesia tidak membenarkan adanya bentuk pelaksanaan atas apa yang diselenggarakan tidak memiliki ketentuan aturan hukumnya.²

Istilah negara hukum di Indonesia sudah sangat populer, sehingga orang tidak asing lagi dengan sebutan itu. Pada umumnya istilah tersebut dianggap sebagai terjemahan yang tepat dari dua istilah yaitu *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Konsep tersebut selalu dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum, sebab konsep itu tidak lepas dari gagasan untuk memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Menurut Abu Daud Busroh³, negara hukum adalah Negara yang berdasarkan hukum, maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan-tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal ini bukan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2010), hlm.114

³ Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Rineka Citra, 2004), hlm. 64-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya sekedar diatur dalam hukum formal saja, namun lebih dari itu hukum yang terpenting adalah mencapai keadilan di dalam masyarakat.

Hans Kelsen Mengatakan makna dari sebuah Keadilan adalah legalitas, dimana suatu peraturan umum adalah adil apabila diterapkan sesuai dengan aturan tertulis yang mengaturnya, dan sama penerapannya pada semua kasus serupa. Asas legalitas dibangun dengan dengan tujuan meligitimasi hukum dalam kekuasaan pemerintah agar tercipta Negara Hukum di mana pengertiannya adalah negara berdasarkan hukum; hukum menjamin keadilan dan perlindungan bagi semua orang yang ada dalam wilayah negara yang bersangkutan. Segala kegiatan negara berdasarkan hukum atau dalam konteks Negara Hukum Indonesia yaitu Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali.⁴

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat fundamental. Asas legalitas dalam hukum pidana begitu penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diperlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.⁵

⁴https://www.academia.edu/4978927/Perbandingan_Asas_Legalitas_Menurut_Kuhp
diakses tanggal 25-11-2020 jam 20.22

⁵ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2012) .hlm 59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan ini kemudian Hukum Administrasi Negara muncul sebagai pengawas jalannya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Hukum administrasi negara mengandung dua aspek :

1. Aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana alat-alat perlengkapan negara itu melakukan tugasnya.
2. Aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan antara alat perlengkapan administrasi negara dengan para warga negaranya.⁶

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang.”

Negara dapat disebut negara kesatuan apabila kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak sama dan tidak sederajat. Kekuasaan pemerintah daerah bersifat *derivative* (tidak langsung) dan sering dalam bentuk otonom yang luas, sehingga tidak mengenal pembagian badan legislatif pusat dan daerah yang sederajat. Negara kesatuan menurut Soehino⁷ adalah:

“Negara yang tidak tersusun dari beberapa negara melainkan hanya terdiri dari atas satu negara, sehingga tidak ada negara dalam negara. Dengan demikian dalam Negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan negara, menetapkan kebijaksanaan pemerintahan melaksanakan pemerintahan negara baik pusat maupun di daerah-daerah. Asas-asas yang ada pada awalnya adalah asas sentralisasi dan konsentrasi, namun perkembangan berikutnya dianut asas dekonsentrasi dan desentralisasi”.

⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta : UII Press. 2003), hlm 26

⁷ Soehino, *Ilmu Negara Liberty*, (Yogyakarta, 2000). hlm. 228

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Ateng Syafrudin⁸ ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authoritygezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*)⁹.

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

Wilayah merupakan salah satu unsur berdirinya negara. Dan wilayah menjadi bagian yang penting dalam sebuah negara. Dalam perkembangannya daerah perbatasan antar daerah memicu konflik horizontal¹⁰ yang timbul baik persoalan pengelolaan sumber daya alam sampai pada persoalan batas wilayah baik antar Kabupaten/Kota maupun antar Provinsi. Hal ini didasari karena adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengharuskan setiap daerah mengurus kebutuhan rumah tangganya

⁸ Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", (Bandung : Universitas Parahyangan, 2000) hlm.22.

⁹ Ibid.

¹⁰ Syamsuddin Haris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: LIPI Pres, 2006). hlm. 165



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sendiri. Kehendak untuk mewujudkan otonomi daerah dilandasi oleh keprihatinan bangsa semasa Orde Baru karena adanya sentralisme kewenangan dan keuangan yang telah mengakibatkan ketimpangan anggaran pembangunan antara pusat (wilayah Ibukota Jakarta) dan daerah (wilayah lain).¹¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang bersifat otonom, wilayah Daerah Propinsi, terdiri atas wilayah darat dan wilayah laut sejauh dua batas mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan. Untuk menentukan batas dimaksud, setiap Undang-Undang mengenai pembentukan Daerah dilengkapi dengan peta yang dapat menunjukkan dengan tepat letak geografis Daerah yang bersangkutan, demikian pula mengenai perubahan batas Daerah.

Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila terjadi perselisihan antar Daerah diselesaikan oleh Pemerintah secara musyawarah. Apabila dalam penyelesaian perselisihan antar Daerah, terdapat salah satu pihak yang tidak menerima keputusan Pemerintah, pihak tersebut dapat mengajukan penyelesaian kepada Mahkamah Agung.¹²

¹¹ Asep Nurjaman dalam Nurudin, dkk, *Kebijakan Eltis Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm.156

¹² *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud. Apabila terjadi perselisihan antar Provinsi, antara Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya, serta antara Provinsi dan Kabupaten/Kota di luar wilayahnya, Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud dan keputusannya bersifat final. Gubernur dalam menyelesaikan perselisihan tersebut dapat berkonsultasi dengan Pemerintah, Menteri Dalam Negeri dalam menyelesaikan perselisihan dapat berkonsultasi dengan Presiden.¹³

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa kawasan perbatasan negara adalah Kecamatan-Kecamatan terluar yang berbatasan langsung dengan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota lain. Kewenangan Pemerintah Pusat di kawasan perbatasan meliputi seluruh kewenangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai wilayah negara.

Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyelesaikan perselisihan dimaksud. Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan antar Daerah Provinsi, antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya, serta antara Daerah Provinsi dan Daerah

¹³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kabupaten/Kota di luar wilayahnya, Menteri menyelesaikan perselisihan dimaksud. Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak dapat menyelesaikan perselisihan penanganannya dilakukan oleh Menteri. Keputusan Menteri berkaitan dengan penyelesaian perselisihan dan penanganan penyelesaian perselisihan bersifat final. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perselisihan antar Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan diatur dengan Peraturan Menteri.¹⁴

Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah tidak mengatur secara jelas tentang penentuan dan penegasan batas wilayah baik di darat maupun di laut. Namun hal tersebut diatur lebih lanjut didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah.¹⁵

Namun permasalahan yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir adalah tidak adanya pilar batas wilayah antara Kecamatan Sinaboi dengan Kota Dumai, sehingga masyarakat Sinaboi yang sedang membuka lahan tidak tau batas tanah antara Kecamatan Sinaboi dengan Kota Dumai. Hal ini menimbulkan konflik perebutan wilayah antara masyarakat Kecamatan Sinaboi dengan Kota Dumai.¹⁶

¹⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

¹⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah

¹⁶ Sumarno, Masyarakat Kecamatan Sinaboi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Daerah melaksanakan kewenangan masing-masing dalam lingkup batas daerah yang ditentukan, artinya kewenangan suatu daerah pada dasarnya tidak boleh melampaui batas daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila batas daerah tidak jelas akan menyebabkan dua kemungkinan akibat negatif. *Pertama*, suatu bagian wilayah dapat diabaikan oleh masing-masing daerah karena merasa itu bukan daerahnya. *Kedua*, daerah yang satu dapat dianggap melampaui batas kewenangan daerah yang lain sehingga berpotensi timbulnya konflik antar daerah.

Berdasarkan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah bahwa:

- 1) Penetapan pilar dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan daerah yang berbatasan.
- 2) Pilar batas daerah yang sudah tercantum dalam Peraturan Menteri mengenai Batas Daerah dilakukan pemeliharaan pilar dan pembangunan kembali pilar yang hilang dan/atau rusak.
- 3) Penetapan pilar, pemeliharaan pilar, dan pembangunan kembali pilar antar daerah provinsi yang hilang dan/atau rusak difasilitasi oleh Menteri.
- 4) Penetapan pilar, pemeliharaan pilar, dan pembangunan kembali pilar antar daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi yang hilang dan/atau rusak difasilitasi oleh gubernur.

Akan tetapi permasalahan yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir adalah tidak ada pilar batas wilayah antara Kecamatan Sinaboi dengan Kota Dumai, sehingga masyarakat Sinaboi yang sedang membuka lahan tidak tau batas tanah antara Kecamatan Sinaboi dengan Kota Dumai. Hal ini menimbulkan konflik perebutan wilayah antara masyarakat Kecamatan Sinaboi dengan Kabupaten Dumai.

Dalam hal ini persoalan penegasan batas daerah dan penyelesaian masalah perbatasan menjadi sebuah konflik kelembagaan yang seharusnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dapat diselesaikan dengan menjunjung norma keadilan dan keterbukaan antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hillir dengan Kabupaten Dumai di bantu Oleh Gubernur Riau. Jika terjadi konflik antar daerah yang masih satu provinsi sesuai dengan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah bahwa: Penetapan pilar, pemeliharaan pilar, dan pembangunan kembali pilar antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu provinsi yang hilang dan/atau rusak difasilitasi oleh Gubernur.¹⁷

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, penulis tertarik mengkaji lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pemasangan Pilar Batas Wilayah Oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Di Daerah Kecamatan Sinaboi Dan Wilayah Perbatasan Kota Dumai. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat terhadap Pemasangan Pilar Batas Wilayah Oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Di Daerah Kecamatan Sinaboi Dan Wilayah Perbatasan Kota Dumai. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum yaitu pendekatan yang melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Maka dari itu penulis mengangkat suatu judul penelitian **“Pelaksanaan Pemasangan Pilar Batas Wilayah Oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Di Daerah Kecamatan Sinaboi Dan Wilayah Perbatasan Dumai Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah”**

¹⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini lebih terfokus, tersusun sistematis dan terarah maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini terhadap bagaimana pelaksanaan pemasangan pilar batas wilayah oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di Daerah Kecamatan Sinaboi dan Wilayah Perbatasan Dumai berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, serta faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemasangan pilar batas wilayah oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di Daerah Kecamatan Sinaboi dan wilayah perbatasan Dumai.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemasangan pilar batas wilayah oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di Daerah Kecamatan Sinaboi dan wilayah perbatasan dumai berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah?
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan pemasangan pilar batas wilayah oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di Daerah Kecamatan Sinaboi dan wilayah perbatasan Dumai?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemasangan pilar batas wilayah oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di Daerah Kecamatan Sinaboi dan wilayah perbatasan Dumai berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemasangan pilar batas wilayah oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Di Daerah Kecamatan Sinaboi Dan Wilayah Perbatasan Dumai.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis
 - 1) Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan.
 - 2) Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam pelaksanaan pemasangan pilar batas wilayah oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di Daerah Kecamatan Sinaboi dan wilayah perbatasan Dumai berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Wilayah.

b. Secara Praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan pemasangan pilar batas wilayah oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di Daerah Kecamatan Sinaboi dan wilayah perbatasan Dumai berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu atau metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.¹⁸ Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara- cara yang masuk akal. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengetahui cara- cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.¹⁹

1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial,

¹⁸ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011) jilid 1, h.1.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: sinar Grafika, 2011), h.24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.²⁰ Adapun metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum yaitu pendekatan yang melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.²¹ Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang di gunakan untuk melihat aspe-aspek hukum dalam interaksi sosial dan bagaimana hukum beroperasi di dalam masyarakat. Penelitian ini di lakukan terhadap pelaksanaan pemasangan pilar batas wilayah oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di Daerah Kecamatan Sinaboi dan wilayah perbatasan Dumai berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah. dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian di lanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan penulis lakukan terletak di Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam sebuah penelitian yaitu Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Camat Sinaboi, serta masyarakat Kecamatan Sinaboi yang mengalami konflik perebutan wilayah dengan warga

²⁰ Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*. (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006)

²¹ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, h.175

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Dumai. Sedangkan Objek penelitian adalah yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Objek penelitian yang akan di teliti adalah pemasangan pilar batas wilayah oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di Daerah Kecamatan Sinaboi dan wilayah perbatasan Dumai berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah.

4. Populasi Dan Sampel

- a. Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti.²²
- b. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.²³ Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.

Tabel 1.1
Populasi Dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Rokan Hilir	1 orang	1 orang	100%
2.	Camat Sinaboi	1 orang	1 orang	100%
3.	Masyarakat Sinaboi yang terlibat konflik	20 orang	18 orang	90%
Jumlah		22 orang	20 orang	

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2011), h.122

²³ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grub, 2011), h.155

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Sumber Data

Sumber data adalah tempat di perolehnya data.²⁴ Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara yaitu dengan Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Camat Sinaboi, serta masyarakat Kecamatan Sinaboi yang mengalami konflik perebutan wilayah dengan warga Kabupaten Dumai, serta observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di olah oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.

Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang di bahas. Bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, antara lain :

²⁴ Zainuddin Ali, *Op Cit.* h.176

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Observasi

Peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian, Hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wawancara

Peneliti melakukan percakapan kepada narasumber untuk memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan untuk memperoleh data-data yang ingin diteliti.

7. Teknik Analisis Data

Analisa data yang dilakukan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini adalah terlebih dahulu diuraikan beberapa permasalahan yang dimunculkan guna memberikan arah terhadap penelitian yang dilakukan. Data yang dikumpulkan secara keseluruhan selanjutnya akan dibahas atau dianalisa. Untuk menggambarkan apa yang telah dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan maupun perilaku yang nyata, peneliti menggunakan metode kualitatif.

Kemudian pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan yang meliputi keseluruhan hasil pembahasan atau analisa data yang telah dilakukan. Dalam penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah suatu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip khusus menuju penulisan umum.

F. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan pembahasan, akan dibagi dalam lima bagian penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,, metode penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang gambaran umum lokasi penelitian, yaitu Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tentang konsep-konsep yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian, yang meliputi tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintahan Daerah, pilar batas wilayah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, serta teori negara hukum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai Pelaksanaan Pemasangan Pilar Batas Wilayah Oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Di Daerah Kecamatan Sinaboi Dan Wilayah Perbatasan Dumai Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah serta faktor-faktor penghambat Pelaksanaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

Pemasangan Pilar Batas Wilayah Oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Di Daerah Kecamatan Sinaboi Dan Wilayah Perbatasan Dumai

PENUTUP

Bab ini menyajikan tentang kesimpulan dan saran.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Sinaboi

Sinaboi adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, Indonesia. Sinaboi adalah kepenghuluan yang berkembang sangat pesat karena berbatasan langsung dengan Kota Dumai, dimana kota tersebut berkembang sangat pesat, dan Sinaboi akan menjadi pelabuhan nusantara utama bagi Kota Bagansiapi-api. Karena jarak dari Bagansiapi-api ke sinaboi dapat ditempuh perjalanan darat lebih kurang 30 km, dan itu memudahkan masyarakat untuk berkunjung ke Kepenghuluan Sinaboi. Pemerintah Kepenghuluan Sinaboi berkomitmen penuh melayani masyarakat, dan sebagai kepenghuluan yang mandiri, Sinaboi tumbuh bersama dengan masyarakat untuk menjadikan kepenghuluan yang terdepan.

Kecamatan Sinaboi merupakan kecamatan yang termasuk dalam wilayah kabupaten Rokan Hilir. Letak kecamatan Sinaboi 365 Km dari Ibu Kota Propinsi dan 40 Km dari Ibu Kota Kabupaten Rokan Hilir. Dilihat dari letak geografis Kecamatan Sinaboi Berbatasan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Dumai\Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Dumai
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sinaboi

Kecamatan Sinaboi terdiri dari ketinggian Wilayah Kecamatan Sinaboi dari permukaan laut adalah 10 M. Di Kecamatan Sinaboi memiliki banyaknya curah hujan 60 mm. Suhu rata-rata 34°C.

B. Perkembangan Penduduk

Penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi dan unsur untuk membangun suatu perekonomian. Tingkat perkembangan penduduk harus diketahui sebagai pedoman dalam perencanaan maupun evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan pembangunan suatu Negara/Daerah. Selain itu penduduk merupakan faktor penting dalam dinamika pembangunan. Karena penduduk merupakan modal yang efektif bagi pembangunan nasional. Bila penduduk yang besar tersebut berkualitas baik.

Selain dari pada itu, penduduk sebagai sumber daya pembangunan, penduduk merupakan pelaku pembangunan. Namun sebagai sasaran pembangunan, penduduk merupakan objek dari pembangunan. Jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal bagi pembangunan, tapi apabila tanpa diikuti dengan peningkatan dengan peningkatan kualitas yang tinggi, jumlah penduduk yang besar akan menjadi tanggungan.

Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor dalam melakukan produksi, karena penduduk merupakan sumber dari faktor tenaga kerja yang bekerja untuk menghasilkan barang dan jasa, di samping itu penduduk juga merupakan suatu bangsa pasar yang sangat potensial, dengan jumlah penduduk yang banyak atau jumlah yang sangat besar maka terdapat pasar yang cukup luas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penduduk merupakan sumber daya yang sangat diperlukan selain sebagai objek pembangunan juga subjek pembangunan. Penduduk Kecamatan Sinaboi berjumlah 15.568 jiwa. dengan perincian Jumlah Laki-Laki 7.967 jiwa perempuan 7.601 jiwa dan terdapat 4080 kepala keluarga. Selain jumlah yang terdapat baku yang terdapat di kantor Kecamatan Sinaboi ada juga penduduk Kecamatan Sinaboi yang masih belum tercatat sehingga jumlah keseluruhan dari penduduk Kecamatan Sinaboi belum semua terdaftar didata kependudukan. Banyak faktor yang belum bias membuat mereka tercatat sebagai penduduk asli Kecamatan Sinaboi. Antara lain tidak memiliki surat pindah dan lain sebagainya sehingga status mereka sebatas penumpang untuk sementara atau pendatang tidak resmi

Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk Kecamatan sinaboi selama menurut umur dapat kita lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.1:
Jumlah Penduduk Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
1.	2015	12.890	2.760
2.	2016	13.606	3.521
3.	2017	15.399	3.735
4.	2018	15.462	3.834
5.	2019	15.568	4.080

Sumber: Kantor Kecamatan Sinaboi kabupaten rokan Hilir 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir dalam kurun waktu 5 tahun terus mengalami peningkatan jumlah penduduk bervariasi. Jumlah penduduk yang paling tinggi adalah pada tahun 2018-2019 yaitu sebanyak 15.462-15.568 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang terendah adalah pada tahun 2015 yaitu sebesar 12.890.

C. Penduduk Menurut Mata Pencarian

Pada umumnya mata pencarian penduduk Kecamatan Sinaboi adalah keluarga nelayan, tetapi masih ada penduduk yang memiliki profesi selain nelayan, seperti terlihat pada tabel.

Tabel II.2 :
Penduduk Menurut Mata Pencarian Kecamatan Sinaboi
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020

No	Jenis Mata Pencarian	Jumlah KK
1.	Nelayan	1.084
2.	Petani	1.643
3.	Buruh	254
4.	PNS	77
	Jumlah	3.058

Sumber data: Kantor Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir 2020

Dari tabel II.2 dapat kita lihat bahwa sebagian besar penduduk di Kecamatan Sinaboi bekerja sebagai keluarga petani dan nelayan.

D. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Kecamatan Sinaboi

Tabel II.3 :
Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan Sinaboi
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1.	Belum Sekolah	2.360	15,16
2.	TTSD	3.690	23,70
3.	SD	5.068	32,55
4.	SMP	2.610	16,77
5.	SMA	1.731	11,12
6.	D3	70	0,45
7.	S1	46	0,30
	Jumlah	15.568	100,00

Sumber data: Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir 2020

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Sinaboi sebagai besar hanya tamatan SD yakni sebesar 5.068 jiwa, atau 32,55 % belum sekolah yakni sebesar 2.360 jiwa atau 15,16%, tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

tamat sekolah dasar (TTSD) yakni sebesar 3.690 jiwa atau 23,70 %. Tamatan Sekolah menengah pertama(SMP) yakni sebesar 2.610 jiwa, tamatan sekolah menengah atas(SMA) yakni sebesar 1.731 jiwa atau 11,12 %. Sedangkan Tamatan Akademi (D3) yakni sebesar 70 jiwa atau 0,45%. Dan tamatan Sarjana (S1) yakni sebesar 46 jiwa atau 0,30%.

Tingkat pendidikan masyarakat sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya pembangunan suatu daerah/ bangsa semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat akan membawa pengaruh positif bagi masa depan berbagai bidang kehidupan. Mengingat pentingnya peranan pendidikan, maka pendidikan mendapat perhatian utama dari pemerintahataupun masyarakat.

Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi dalam sumber daya manusia. Pendidikan memberikan langsung nilai sumbangan terhadap pertumbuhan pendapatan daerah melalui peningkatan keterlamlan dan produktivitas kerja. Pendidikan diharapkan dapat mengatasi keterbelakangan ekonomi lewat efek nya pada peningkatan kemampuan manusia dan motivasi manusia untuk berpatipasi.

Pendidikan berfungsi untuk menyiapkan salah satu input dalam proses produksi, yaitu tenaga kerja agar dapat bekerja dengan produktif karena kualitasnya.hal ini selanjutnya akan mendorong peningkatan output yang diharapkan bermuara pada kesejahteraan penduduk kombinasi antara investasi dalam modal manusia dan modal fisik diharapkan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi.titik singgung antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi adalah produk tivitas tenaga kerja (labor produktiviti). Dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

asumsi semakin tinggi produktivitas tenaga kerja ,dan semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat.demikian pentingnya peranan pendidikan menjadi perhatian bagi pemerintah maupun masyarakat.

E. Sarana Dan Prasarana Umum Kecamatan Sinaboi

Tabel II.4 :
Sarana dan Prasarana Umum Di Kecamatan Sinaboi
Kabupaten Rokan Hilir 2020

No	Jenis Sarana Dan Prasarana	Jumlah
1.	Rumah	4.080
2.	Tempat Ibadah	59
3.	Sekolah	18
4.	Posyandu	4
5.	Koperasi	2
6.	Balai Pertemuan	5
7.	Transportasi	12
8.	Jembatan	22
9.	Toko Kios/warung	263
10.	Rumah Makan	8
	Jumlah	4.473

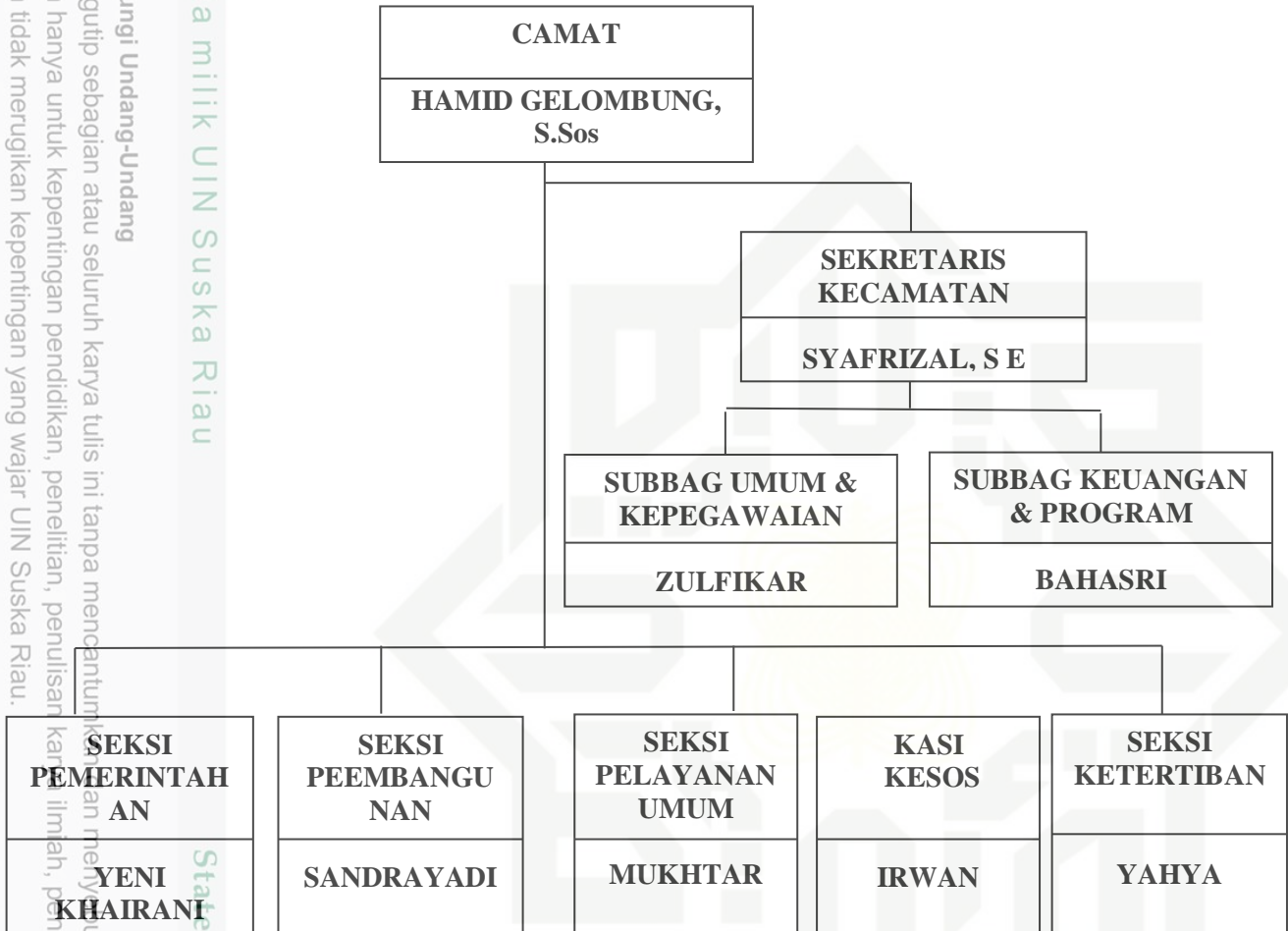
Sumber data: Kantor Camat Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir 2020

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa secara umum sarana prasarana Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir sudah memadai. Pada Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir ini telah memiliki 4.080 rumah, 59 tempat ibadah, 18 sekolah, 4 posyandu, 2 koperasi, 5 balai pertemuan, 12 transportasi, 22 jembatan, 263 toko kios/warung, dan memiliki rumah makan 8 unit di kecamatan Sinaboi.



F. Struktur Organisasi Kecamatan Sinaboi

Tabel II.5
Struktur Organisasi Kecamatan Sinaboi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TIJAUAN PUSTAKA

A. Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan “Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk republik”. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk Negara Indonesia adalah kesatuan sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik.²⁵ Yang dimaksud dengan Negara kesatuan ialah suatu Negara yang merdeka dan berdaulat, dimana seluruh Negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintah yang mengatur seluruh daerah, jadi tidak terdiri atas beberapa daerah yang berstatus Negara bagian.

Negara menurut teori modern yang disampaikan Kranenberg menyatakan bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Sedangkan Logeman mengatakan bahwa negara pada hakekatnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang meliputi atau menyatukan kelompok manusia yang disebut bangsa.

Dari dua pendapat tersebut negara pada hakekatnya adalah suatu organisasi kekuasaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu sebagaimana yang telah disepakati dan ditentukan. Atau dapat dikatakan bahwa mendirikan suatu negara pada hakekatnya adalah mendirikan dan membentuk organisasi kekuasaan. Kekuasaan tersebut secara visual dapat dibagi dengan dua cara yaitu:

²⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Secara Vertikal; yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatannya dan dalam hal ini tingkat pemerintahan. Carl J. Frederich memakai istilah pembagian kekuasaan secara teritorial (*teritorial devision of power*). Pembagian kekuasaan ini dengan jelas dapat disaksikan kalau kita bandingkan antara negara kesatuan, negara federal serta konfederasi.
2. Secara Horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Dan pembagian ini menunjukkan perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif yang lebih dikenal sebagai *Trias Politica* pembagian kekuasaan *division of power*.²⁶

Negara dapat disebut negara kesatuan apabila kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak sama dan tidak sederajat. Kekuasaan pemerintah pusat adalah kekuasaan tertinggi dari suatu negara, demikian juga badan legislatif pusat dalam membentuk undang-undang. Kekuasaan pemerintah daerah bersifat *derivative* (tidak langsung) dan sering dalam bentuk otonom yang luas, sehingga tidak mengenal pembagian badan legislatif pusat dan daerah yang sederajat. Negara kesatuan menurut Soehino²⁷ adalah :

Negara yang tidak tersusun dari beberapa negara melainkan hanya terdiri dari atas satu negara, sehingga tidak ada negara dalam negara. Dengan demikian dalam Negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan negara, menetapkan kebijaksanaan pemerintahan melaksanakan pemerintahan negara baik pusat maupun di daerah-daerah.

²⁶ Meriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT. Gramedia, 2001). hlm. 138

²⁷ Soehino, *Ilmu Negara Liberty*, (Yogyakarta, 2000). hlm. 228

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asas-asas yang ada pada awalnya adalah asas sentralisasi dan konsentrasi, namun perkembangan berikutnya dianut asas dekonsentrasi dan desentralisasi.

B. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Pemerintah Daerah secara sederhana berasal dari dua kata yaitu Pemerintah dan Daerah. Selanjutnya, Pemerintah jika ditinjau dari definisi kata (etimologi), yaitu berasal dari kata dasar kata perintah yang berarti melakukan pekerjaan memerintah atau menyuruh, setelah ditambah awalan “Pe” yang menjadi Pemerintah, akan berarti badan atau organisasi yang mengurus. Jika kemudian ditambah dengan akhiran “an”, maka akan menjadi pemerintahan yang berarti perbuatan, cara atau perihal.²⁸

Menurut W.S Sayre, Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter, Pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakup dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.²⁹

Pembentukan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat pasal 18 UUD Tahun 1945 telah melahirkan berbagai produk Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, antara lain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945,

²⁸ Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2013), h. 8.

²⁹ *Ibid*, h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, serta terakhir Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah. Secara substansial undang-undang tersebut mengatur tentang bentuk susunan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan Pemerintahan adalah Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden, dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD. Setiap Daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Daerah yang disebut Kepala Daerah, untuk Provinsi disebut Gubernur, untuk Kabupaten disebut Bupati, dan untuk Kota disebut Walikota. Kepala Daerah dibantu oleh satu orang Wakil Kepala Daerah, yang masing-masing untuk Provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk Kabupaten disebut Wakil Bupati, dan untuk Kota disebut Wakil Walikota.³⁰

2. Asas-Asas Pemerintahan Daerah

Selama ini dipahami bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah didasarkan tiga asas, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Undang-Undang yang mengatur pemerintahan daerah setidaknya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur ketiga macam asas tersebut. Namun, dalam perubahan Undang-

³⁰ Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 54-55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (2), ditegaskan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Macam-macam asas pemerintahan daerah³¹:

a. Asas Desentralisasi

Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Dengan demikian, prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaannya maupun mengenai segi-segi pembiayaannya. Perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri.

Desentralisasi pada dasarnya terjadi setelah sentralisasi melalui asas dekonsentrasi tidak dapat melaksanakan tugas pemerintahan secara baik dalam arti pemerintahan gagal dalam mewujudkan Pemerintahan yang demokratis. Suatu Pemerintahan yang mampu mengakomodasikan unsur-unsur yang bersifat kedaerahan berdasarkan aspirasi masyarakat daerah. Tujuan desentralisasi adalah agar penyelenggaraan Pemerintahan di daerah lebih disesuaikan dengan

³¹ Ni Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2011), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadaan daerah masing-masing dalam rangka desentralisasi dibentuk Daerah otonom.³²

b. Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Tanggung jawab tetap ada pada pemerintahan pusat. Baik perencanaan dan pelaksanaannya maupun pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Unsur pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku wakil Pemerintah Pusat.

Amrah Muslimin mengartikan dekonsentrasi ialah pelimpahan dari sebagian kewenangan Pemerintah Pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah. Irawan Soejito mengartikan dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan penguasa kepada pejabat bawahannya sendiri. Sedangkan Joeniarto mengatakan dekonsentrasi adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada alat-alat perlengkapan bawahan untuk menyelenggarakan urusan-urusannya yang terdapat di daerah.³³

c. Asas Tugas Pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan

³² *Ibid.*,

³³ *Ibid.*,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi tugas. Misalnya, Kotamadya menarik pajak-pajak tertentu seperti pajak kendaraan, yang sebenarnya menjadi hak dan urusan pemerintah pusat. Bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah otonom dan wilayah-wilayah administrasi.

Daerah Otonom atau Daerah Swatantra adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daerah ini dibentuk berdasarkan asas desentralisasi. Wilayah administrasi atau wilayah adalah lingkungan kerja perangkat pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan umum di daerah. Wilayah ini dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi.³⁴

C. Pilar Batas Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah

Penegasan Batas Daerah adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas daerah.

³⁴ C.S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2000), h. 3-4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Batas Daerah di Darat adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/punggung (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

Sedangkan batas Daerah di Laut adalah pembatas kewenangan pengelolaan sumber daya di laut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Batas Daerah secara pasti di Lapangan adalah kumpulan titik-titik koordinat geografis yang merujuk kepada sistem georeferensi nasional dan membentuk garis batas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah.

Tim Penegasan Batas Daerah Pusat yang selanjutnya disebut Tim PBD Pusat adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri. Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Tim PBD Provinsi adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur. Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim PBD Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Wali Kota.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah menjelaskan bahwa :

1. Penegasan Batas Daerah berpedoman pada dokumen penegasan batas.
2. Dokumen penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Undang-Undang mengenai Pembentukan Daerah dan Peta Lampirannya;
 - b. Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) terkait dengan batas daerah;
 - c. Peta rupa bumi ndonesia;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Peta topografi angkatan darat, Peta badan pertanahan nasional, peta minutes dan peta-peta lain yang secara teknis dapat digunakan sebagai acuan penegasan batas;
 - e. Citra/foto hasil penginderaan jauh (*remote sensing*);
 - f. Kesepakatan tentang batas daerah yang pernah dibuat pemerintah daerah yang berbatasan; dan
 - g. Dokumen lain yang berkaitan dengan batas wilayah administrasi yang disepakati para pihak.
3. Penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kartometrik dan/atau *survey* lapangan berdasarkan kesepakatan Tim Penegasan Batas Daerah.
 4. Penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Batas daerah di darat; dan
 - b. Batas daerah di laut
 5. Batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri

Kemudian Tim Penegasan Batas Daerah Pasal 16 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan

Batas Daerah menyatakan bahwa :

1. Dalam rangka penegasan batas daerah dibentuk Tim Penegasan Batas Daerah yang selanjutnya disebut Tim PBD.
2. Tim PBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tim PBD Pusat;
 - b. Tim PBD Provinsi; dan
 - c. Tim PBD Kabupaten/Kota.

Selanjutnya Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah

menyatakan bahwa :

1. Tim PBD Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
2. Tim PBD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
3. Tim PBD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf (c) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.

Seterusnya Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah

menyatakan bahwa :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Susunan keanggotaan Tim PBD Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), terdiri atas:

Ketua	: Menteri Dalam Negeri.
Wakil Ketua	: Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.
Sekretaris	: Direktur Toponimi dan Batas Daerah.
Anggota	: a. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
	b. Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial;
	c. Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL;
	d. Direktur Topografi Angkatan Darat;
	e. Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional; dan
	f. Pejabat dari kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian terkait lainnya.
2. Susunan keanggotaan Tim PBD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), terdiri atas:

Ketua	: Gubernur.
Wakil Ketua	: Wakil Gubernur.
Sekretaris	: Sekretaris Daerah.
Anggota	: a. Asisten yang membidangi urusan pemerintahan;
	b. Kepala Biro yang membidangi pemerintahan;
	c. Kepala Biro yang membidangi Hukum;
	d. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah;
	e. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;
	f. Kepala Topografi Daerah Militer; dan
	g. Pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah terkait lainnya dan/atau instansi vertikal di daerah terkait lainnya.
3. Susunan keanggotaan Tim PBD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), terdiri atas:

Ketua	: Bupati/Wali Kota.
Wakil Ketua	: Wakil Bupati/Wakil Wali Kota.
Sekretaris	: Sekretaris Daerah.
Anggota	: a. Asisten yang membidangi urusan pemerintahan;
	b. Kepala Bagian yang membidangi pemerintahan;
	c. Kepala Bagian yang membidangi Hukum;
	d. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah;
	e. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional; dan
	f. Pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah dan lembaga terkait lainnya.

Seterusnya Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah menyatakan bahwa :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Tim PBD Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi penegasan batas antar daerah Provinsi;
 - b. memfasilitasi penegasan batas antar daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi atas permintaan Gubernur kepada Menteri; dan
 - c. memfasilitasi penegasan batas antar daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi yang berselisih dan diserahkan penyelesaiannya oleh Gubernur kepada Menteri.
2. Tim PBD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penegasan batas antar daerah Provinsi; dan
 - b. memfasilitasi penegasan batas antar daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.
3. Tim PBD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan penegasan batas antar Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah dalam hal Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah dilakukan :

1. Dalam hal terjadi perselisihan penegasan batas daerah antar daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antar daerah provinsi, diselesaikan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyelesaian perselisihan batas daerah antara pemerintah dan pemerintah daerah.
2. Perselisihan batas daerah antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan oleh gubernur.
3. Penegasan dan perselisihan batas daerah antar daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan oleh Menteri.

Kemudian Pasal 22 Penyelesaian Perselisihan oleh Gubernur dilakukan:

1. Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), difasilitasi oleh Gubernur dengan mengundang rapat Bupati/Wali Kota yang berselisih.
2. Hasil fasilitasi oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Berita Acara Penyelesaian Perselisihan yang ditandatangani oleh para pihak.
3. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah menyatakan bahwa :

1. Dalam hal tidak tercapai penyelesaian perselisihan pada rapat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Gubernur mengundang Bupati/Wali Kota yang berselisih dalam rapat kedua paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah rapat pertama.
2. Hasil rapat penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat Berita Acara oleh Gubernur dan disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

Seterusnya Pasal 24 menyatakan bahwa :

1. Dalam hal tidak tercapai penyelesaian perselisihan pada rapat kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Gubernur mengundang Bupati/Wali Kota dan Tim PBD Pusat dalam rapat ketiga paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah rapat kedua.
2. Gubernur membuat berita acara hasil rapat penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.
3. Apabila Gubernur tidak dapat menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur menyerahkan proses selanjutnya kepada Menteri Dalam Negeri.
4. Dalam hal Gubernur tidak menyerahkan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri mengambil alih penyelesaian penegasan batas.

Seterusnya Penyelesaian Perselisihan oleh Menteri Pasal 25 menyatakan bahwa :

1. Penegasan dan Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (3) dan (4) dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, dengan mengundang rapat Gubernur dan Bupati/Wali Kota yang berselisih.
2. Gubernur dan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berselisih, memaparkan kondisi riil wilayah yang dipermasalahkan dan melakukan pertukaran dokumen dalam rapat penyelesaian perselisihan

Berdasarkan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah dalam hal Penetapan Pilar Batas Wilayah menyatakan bahwa :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Perapatan pilar dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan daerah yang berbatasan.
2. Pilar Batas daerah yang sudah tercantum dalam Peraturan Menteri mengenai Batas Daerah dilakukan pemeliharaan pilar dan pembangunan kembali pilar yang hilang dan/atau rusak.
3. Perapatan pilar, pemeliharaan pilar, dan pembangunan kembali pilar antar daerah provinsi yang hilang dan/atau rusak difasilitasi oleh Menteri.
4. Perapatan pilar, pemeliharaan pilar, dan pembangunan kembali pilar antar daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi yang hilang dan/atau rusak difasilitasi oleh gubernur.

Kemudian Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah menyatakan bahwa :

1. Perapatan pilar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dilaksanakan dengan mengacu kepada Peta lampiran Peraturan Menteri mengenai Batas Daerah.
2. Rencana pelaksanaan perapatan pilar tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama antar daerah kabupaten/kota yang berbatasan dalam satu daerah provinsi.
3. Perjanjian Kerja Sama perapatan pilar antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi difasilitasi oleh Gubernur.
4. Hasil perapatan pilar batas antar daerah kabupaten/kota disampaikan kepada Menteri.
5. Hasil perapatan pilar batas antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi ditetapkan dengan peraturan menteri.

Seterusnya Pasal 34 menyatakan bahwa Batas Daerah yang telah diatur oleh Menteri dapat diubah dalam hal:

1. Adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Kesepakatan antar daerah kabupaten/kota yang berbatasan dan diusulkan secara bersama-sama kepada menteri melalui gubernur;
3. Kesepakatan antar daerah provinsi yang berbatasan yang diusulkan secara bersama-sama kepada menteri; dan
4. Penataan daerah.

D. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.

Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

law, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.”³⁵ Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *demokratische rechtsstaat*, yang penting dan *primair* adalah *rechtsstaat*.”³⁶

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini:

“polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat*, *government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”³⁷

Istilah negara hukum di Indonesia sudah sangat populer, sehingga orang tidak asing lagi dengan sebutan itu. Pada umumnya istilah tersebut dianggap sebagai terjemahan yang tepat dari dua istilah yaitu *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Konsep tersebut selalu dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum, sebab konsep itu tidak lepas dari gagasan untuk memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun sebenarnya antara *rechtsstaat* dan *the rule of law* itu mempunyai latar belakang dan pelembagaan yang berbeda, tetapi pada intinya sama-sama menginginkan

³⁵ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970), h.27.

³⁶ Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984), h. 67.

³⁷ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

perlindungan hak-hak asasi manusia melalui peradilan yang bebas dan tidak memihak. Istilah *rechtsstaat* banyak dianut di negara-negara eropa kontinental yang bertumpu pada sistem *civil law*, sedangkan *the rule of law* banyak berkembang di negara-negara dengan tradisi *anglo saxon* yang bertumpu pada sistem *common law*. Kedua sistem memiliki perbedaan titik berat pengoperasian, *civil law* menitikberatkan pada administrasi sedangkan *common law* menitikberatkan pada *judicial*.

Menurut Abu Daud Busroh³⁸, negara hukum adalah Negara yang berdasarkan hukum, maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan-tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal ini bukan hanya sekedar diatur dalam hukum formal saja, namun lebih dari itu hukum yang terpenting adalah mencapai keadilan di dalam masyarakat.

Negara hukum dapat dibedakan atas 2 (dua) ciri-ciri, yaitu dilihat dari sisi hukum formal³⁹ dan dilihat dari sisi hukum material. Ciri-ciri dari negara hukum formal¹⁸ menurut Friederich J Stahl yang dikutip oleh Mahfud MD adalah:

1. Hak-hak asasi manusi
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia itu yang biasa dikenal sebagai Trias Politika.
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan.

³⁸ Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Rineka Citra, 2004) hlm. 64-66

³⁹ Moch Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Yogyakarta : Gama Media, 1999), hlm. 127

Peradilan administrasi dalam perselisihan

Terdapat dua-belas prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya.

Adapun prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut:⁴⁰

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*); adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.
2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*); adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik.
3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*); dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.
4. Pembatasan Kekuasaan; Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.
5. Organ-Organ Eksekutif Independen; dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam *Simbur Cahaya* No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan yang bersifat ‘*independent*’, seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan.

6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak; Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).
7. Peradilan Tata Usaha Negara; Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*); di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia; adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis.
10. Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*); dianut dan dipraktekkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.
11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*); hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

12. Transparansi dan Kontrol Sosial; adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peranserta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

Sementara itu, cita Negara Hukum di Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide Negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide “*rechtsstaat*”, bukan “*machtsstaat*”. Guna menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau pembentukan hukum.⁴¹

⁴¹ *Ibid.*,



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemasangan pilar batas wilayah oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di daerah Kecamatan Sinaboi dan wilayah perbatasan Dumai berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegsasan Batas Daerah belum terlaksana karena sampai saat ini belum ada tapal batas daerah yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang berada di Kecamatan Sinaboi, sehingga masih menimbulkan konflik antar masyarakat daerah tersebut.
2. Faktor penghambat pelaksanaan pemasangan pilar batas wilayah oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di Daerah Kecamatan Sinaboi dan Wilayah Perbatasan Kota Dumai adalah diantaranya; (i) kurangnya kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam menyelesaikan permasalahan tapal batas yang ada di Kecamatan Sinaboi; (ii) kurangnya kesadaran hukum; (iii) belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

B. Saran

Untuk terlaksananya penegasan pilar batas wilayah oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di Daerah Kecamatan Sinaboi dan Wilayah Perbatasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dumai Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegsaan Batas Daerah sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Maka setelah melakukan penelitian penulis mencoba memberikan beberapa saran yaitu :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir disarankan agar menyelesaikan permasalahan tapal batas yang ada di Kecamatan Sinaboi bahwa sebagaimana berdasarkan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegsaan Batas Daerah bahwa penetapan pilar, pemeliharaan pilar, dan pembangunan kembali pilar antar daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi yang hilang dan/atau rusak dapat dilakukan.
2. Sebagaimana hasil penelitian bahwa faktor penghambat pelaksanaan pemasangan pilar batas wilayah oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di Daerah Kecamatan Sinaboi dan wilayah perbatasan Kota Dumai adalah diantaranya; (i) kurangnya kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam menyelesaikan permasalahan tapal batas yang ada di Kecamatan Sinaboi; (ii) kurangnya kesadaran hukum; (iii) belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak, maka kedepannya harus lebih baik lagi dengan meingkatkan kepedulian dan/atau kesadaran hukum Pemerintah Daerah sehingga tidak ada lagi permasalahan konflik masyarakat yang berkepanjang di Kecamatan Sinaboi terkait dengan tapal batas.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, (Bandung : Universitas Parahyangan, 2000)
- Asep Nurjaman dalam Nurudin, dkk, *Kebijakan Eltis Politik Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo, 2011
- C.S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000
- Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006
- Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2013
- Joko Subagyo, *Metode penelitian dalam teori dan praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2011
- Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grub, 2011
- Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, 2012
- Meriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT. Gramedia, 2001
- Moch Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta : Gama Media, 1999
- Ni Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2011
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : UII Press. 2003
- Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Soehino, *Ilmu Negara Liberty*, Yogyakarta: 2000
- Syamsuddin Haris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Jakarta: LIPI Pres, 2006
- Sri Sumantri dan Bintang R Saragih, *Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia (30 Tahun kembali ke undang undang dasar 1945)*, Jakarta Pustaka : Sinar Harapan, 1993)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Syamsuddin Haris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: LIPI Pres, 2006

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2010

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

B. Jurnal

Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam *Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614*.

C. Internet

https://www.academia.edu/4978927/Perbandingan_Asas_Legalitas_Menurut_Kuh
pdiakses tanggal 25-11-2020 jam 20.22

D. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESEAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul "PEMASANGAN PILAR BATAS WILAYAH OLEH PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR DI DAERAH KECAMATAN SINABOI DAN WILAYAH PERBATASAN DUMAI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN BATAS WILAYAH" yang ditulis oleh :

Nama : **MUKHAMAD RUDIANTO**
 NIM : 11627104095
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 04 November 2021
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 November 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Asril, S.H.I., M.H.

Sekretaris
Joni Alizon, S.H., M.H.

Penguji I
Syafrinaldi, SH., MA.

Penguji II
Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

Mengetahui:

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalmus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 03 Februari 2021

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1660/2021
Sifat : Biasa
Lamp : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: MUKHAMAD RUDIANTO
NIM	: 11627104095
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: IX (Sembilan)
Lokasi	: Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Sinaboi

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Pemasangan Pilar Batas Wilayah Oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Di Daerah Kecamatan Sinaboi Dan Wilayah Perbatasan Dumai Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Batas Wilayah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN KECAMATAN BATU EMPAT TELP. (0767) 22113 FAX. (0767) 22113
BAGANSIAPIAPI

Bagansiapiapi, 7 Juni 2021

Kepada Yth.
Camat Sinaboi
Kabupaten Rokan Hilir
di-

Tempat

070/Kesbangpol/2021/ 100.

Biasa

Rekomendasi Riset

Membaca Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/40874 tanggal 20 April 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Riset, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

1. Nama : **MUKHAMAD RUDianto**
2. NIM / KTP : 11627104095
3. Program Studi : ILMU HUKUM
4. Jenjang : S1
5. Alamat : Jl.Manggis RT/RW 001/003 Desa Bantayan Baru
6. Judul : **PELAKSANAAN PEMASANGAN PILAR BATAS WILAYAH OLEH PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR DI DAERAH KECAMATAN SINABOI DAN WILAYAH PERBATASAN DUMAI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN BATAS WILAYAH**
7. Lokasi : KECAMATAN SINABOI KABUPATEN ROKAN HILIR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam proposal yang tidak sesuai/ tidak ada kaitannya dengan Penelitian dimaksud.
2. Pelaksanaan Penelitian berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung Tanggal dibuatnya surat ini hingga selesai.
3. Salinan Hasil Riset agar disampaikan pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Rokan Hilir.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan kepada pihak yang terkait dapat memberikan kemudahan kelancaran kegiatan ini.

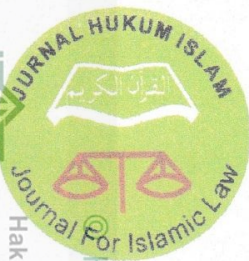
a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN ROKAN HILIR
Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan
Konflik



DODI SUHENDRA, S.Sos
NIP. 19720902 199201 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
2. Yang Bersangkutan



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : MUKHAMMAD RUDIANTO
NIM : 11627104095
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : PEMASANGAN PILAR BATAS WILAYAH OLEH PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR DI DAERAH KECAMATAN SINABOI DAN WILAYAH PERBATASAN DUMAI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN BATAS DAERAH

Pembimbing: Syafrinaldi, S.H., M.A

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 29 November 2021

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPLSYAHRIN, SH., MH., CPL.
NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Mukhamad rudianto, lahir di Suak temenggung, pada tanggal 23 juni 1997 merupakan anak ketiga dari 4 (empat) bersaudara, lahir dari pasangan ayahanda mariono dan Ibunda siti zubaidah. Pada tahun 2005, Penulis mulai mengecap dunia pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 003 bantayan baru kecamatan batu hampar kabupaten Rokan hilir. Lulus pada tahun 2011. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan pada SMP Negeri 1 Batu hampar kabupaten Rokan hilir 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2011 sampai tahun 2013. Tamat dari SMP Negeri 1 tersebut, penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMAN 1 Batu hampar, Rokan hilir 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2013 sampai tahun 2016. Kemudian pada tahun 2016 berkat restu dan doa kedua orang tua, penulis melanjutkan pendidikan Strata-1 (S-1) tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum, dengan jurusan Ilmu Hukum.

Selama menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan magang selama 2 (dua) bulan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru. Selanjutnya penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) UIN SUSKA RIAU Angkatan XVIII di Desa bantayan baru, Kecamatan batu hampar, atas berkat dan rahmat Allah SubhanahuWaTa'alasertado'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pemasangan Pilar Batas Wilayah Oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Di Daerah Kecamatan Sinaboi Dan Wilayah Perbatasan Dumai Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah”** di bawah bimbingan langsung Bapak syafrinaldi,SH.,MA. Berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 04 September 2021, penulis dinyatakan LULUS dan telah berhak menyanggah gelar Sarjana Hukum (SH). Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah, Yakin Usaha Sampai.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.